



**PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jalan Arun Komplek Koranil Pasar Bawah Kel. Talang Ubi Timur Telp. 0713.390545



### SURAT IZIN

NOMOR : 420/lot/Diskibud/IV/2015

#### TENTANG

**IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA ( PAUD )  
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN WARGA MASYARAKAT**

KEPADA  
PAUD PNF.I

Kelurahan / Desa : PAUD TERPADU SADAR HATI  
Kecamatan : BENUANG  
Kabupaten : TALANG UBI  
: Penukal Abab Lematang Ilir (PAUI)

Jenis Pendidikan :  
Rumpun Pendidikan :  
1. Kelompok Bermain (KB)  
2. TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Pimpinan Penanggung Jawab  
Penilik Penyelenggara  
Berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Izin Ini.

: NORA QUANI  
: NORA QUANI



**PEMERINTAH KABUPATEN LEMATANG ILIR, 16 Februari 2015**  
**KEPALA Dinas Pendidikan**  
**NORA QUANI**  
NIP. 196701211980031004  
Abu Hanifah





**NOTARIS / PPAT**  
**ATHONG DEWANTO, SH., M.Kn.**

Di  
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir  
Provinsi Sumatera Selatan

NOYOR: 24 / TANGGAL: 17 Januari 2011

AKTA: PERUNTUKAN PERUMPAHAN  
PILAK PERIBINTAN KEMERDEKAAN

SALINAN

Jl. Merdeka Rt. 013 Rw. 004 Talang Ubi Timur  
Penukal Abab Lematang Ilir Sumatera Selatan  
Telp. 0713 - 390454, 0853 8383 7022  
Email : notarisppat\_athongdewanto@yahoo.com

AKTA PENDIRIAN PERKUMPULAN

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT SADAR HATI

Nomor : 04 . -

Pada hari ini, Rabu, tanggal tujuh Januari dua ribu-----  
limabelas (07-01-2015 ).-----

Pukul 09:00 WIB (Sembilan Waktu Indonesia Barat).-----

Berhadapan dengan saya, **ATHONG DEWANTO**, Sarjana Hukum,---  
Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Muara Enim,-----  
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal  
dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :-----



1. Nyonya **NORA QUANI**, lahir di Benuang, pada tanggal-----  
tiga puluh Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh---  
satu (30-03-1991), Guru, Warga Negara Indonesia,-----  
bertempat tinggal di Muara Enim, Komplek Handayani,  
Kelurahan Handayani Mulya, Kecamatan Talang Ubi.-----  
Pemegang Nomor Induk Kependudukan 1603057003910003.---

2. Nyonya **RELI PAWIDA WATI**, lahir di Benuang, pada-----  
tanggal tujuh belas Juni seribu sembilan ratus-----  
delapan puluh dua (17-06-1992), Mengurus Rumah Tangga,  
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Muara---  
Enim, Dusun III Kelurahan Benuang, Kecamatan Talang  
Ubi.-----  
Pemegang Nomor Induk Kependudukan 1603055706820003.---

Kantor Notaris / PPAT  
Athong Dewanto, SH, M. Kn  
di  
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Nona NOSA ISRA, lahir di Benuang, pada tanggal dua puluh enam Pebruari seribu sembilanratus sembilanpuluh dua (26-02-1992), Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Muara Enim, Dusun II, Kelurahan Benuang, Kecamatan Talang Ubi. Pemegang Nomor Induk Kependudukan 1603056602920001.

Pada Penghadap dikenal oleh saya, Notaris, berdasarkan identitas tersebut diatas. Para penghadap Bersama ini menerangkan, bahwa mereka yang satu terhadap yang lain telah saling setuju dan Mufakat untuk mendirikan suatu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:

**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

**Pasal 1**

Pusat kegiatan belajar masyarakat ini bernama Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) " SADAR HATI " Disingkat PKBM " SADAR HATI ", (selanjutnya disebut "Perkumpulan"), berkedudukan di Kelurahan Benuang, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Ditempat-tempat lain yang dipandang perlu oleh Badan Pengurus dapat didirikan cabang-cabang atau perwakilan-perwakilan dari PKBM ini.

**JANGKA WAKTU**

**Pasal 2**

Pertumpulan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan dimulai pada tanggal 04 (empat) Maret 2014 (duaribu empatbelas).

ASAS

Pasal 3

Pertumpulan ini berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Pertumpulan ini mempunyai maksud dan tujuan untuk:

- a. mengadakan kegiatan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. mengadakan kegiatan program Kelompok Belajar Paket A secara SD;
- c. mengadakan kegiatan program Kelompok Belajar Paket B setara SMP;
- d. mengadakan kegiatan program Kelompok Belajar Paket C setara SMA;
- e. mengadakan kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF);
- f. kelompok belajar usaha (KBU);
- g. satuan PAUD sejenis (SES);
- h. membuka Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
- i. mengadakan program Kepemudaan atau Olahraga;
- j. mengadakan program Kursus, Keterampilan dan Pelatihan-pelatihan;

k. pendidikan kecakapan keorangtuan (parenting life skill);-----

l. pendidikan perempuan;-----

m. taman kanak-kanak (TK);-----

n. taman penitipan anak (TPA);-----

o. taman pendidikan al-quran;-----

-----U S A H A (IKHTIAR) -----

-----Pasal 5 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan itu perkumpulan ini akan melakukan berbagai usaha (ikhtiar) yang tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan maksud tujuan Perkumpulan.-----

----- KEANGGOTAAN -----

----- Pasal 6 -----

1. Keanggotaan Perkumpulan ini terdiri dari:-----

(1) Anggota-anggota biasa, yaitu mereka baik pria maupun wanita yang oleh Badan Pengurus diterima sebagai anggota demikian dan membayar uang pangkal pada waktu penerimaan itu serta uang iuran bulanan untuk selanjutnya dan terdiri dari:-----

a. perseorangan dan;-----

b. keluarga yaitu terdiri dari suami-isteri tanpa

atau dengan disertai seorang atau lebih anak

anak mereka yang berusia dibawah 21 (dusapuluh

satu) tahun dan belum menikah.-----

(2) Anggota kehormatan yang terdiri dari:

- a. anggota-anggota kehormatan untuk selama (satu) tahun yaitu yang diangkat sedemikian oleh Badan Pengurus dan;
- b. anggota-anggota kehormatan untuk seumur hidup yaitu anggota biasa yang diangkat sedemikian oleh Rapat Anggota.

2. Tiap anggota berhak untuk:
- a. memilih dan dipilih;
  - b. ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan dan;
  - c. mengeluarkan suara dalam Rapat Anggota.
3. Tiap-tiap anggota berkewajiban:
- a. menjunjung tinggi nama baik Perkumpulan dan memahami, menaati serta tunduk pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lain dari Perkumpulan dan;
  - b. turut mengembangkan harta, tenaga, dan pikiran keahliannya apabila Perkumpulan memerlukan.

4. Keanggotaan dari anggota-anggota biasa dan kehormatan berakhir karena:
- a. atas permintaan sendiri;
  - b. wafat, atau;
  - c. berdasarkan keputusan Rapat Anggota.

SAWAJIR ANGGOTA

Pasal 7

1. Rapat anggota mempunyai kekuasaan dan wewenang tertinggi dalam Perkumpulan.
2. Rapat Tahunan Anggota diadakan setiap tahun dalam bulan Februari atau Maret, dengan cara:
  - a. laporan tahunan Badan Pengurus, terutama mengenai pemberian tanggung jawab hal keuangan dan jalannya Perkumpulan serta hal-hal lainnya yang dianggap penting;
  - b. pembentukan panitia verifikasi;
  - c. pemilihan anggota-anggota Badan Pengurus Baru 3 (tiga) tahun sekali dan;
  - d. hal-hal lain.
3. Selain dari rapat yang dimaksudkan dalam ayat 2 pasal ini, maka Badan Pengurus:
  - a. berhak (berwenang) untuk mengadakan Rapat Anggota setiap kali menganggapnya perlu, dan;
  - b. harus mengadakan Rapat Anggota, bila sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah anggota Perkumpulan mengajukan permintaan untuk itu atau karena menurut ketentuan Anggaran Dasar untuk sesuatu hal diperlukan keputusan dari Rapat Anggota.

Pasal 8

1. Para anggota Perkumpulan harus diberitahukan secara

tertulis sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari ----  
sebelum Rapat Anggota itu dilangsungkan dan diumumkan  
di Warta Harian yang terbit ditempat kedudukan-----  
Perkumpulan dan/atau dipapan pengumuman di Kantor----  
Perkumpulan.-----

2. Pada pemberitahuan tentang suatu Rapat Anggota harus--  
disebut acara, tempat, tanggal dan waktu rapat.-----
3. Semua anggota yang mempunyai hak suara dapat-----  
mengajukan usul-usul untuk dipertimbangkan oleh Rapat  
tersebut.-----
4. Rapat dipimpin oleh ketua atau salah seorang wakil----

ketua.-----  
Jika Ketua dan/atau Wakil Ketua tidak hadir, anggota-  
anggota Badan Pengurus lainnya yang hadir memilih dari  
mereka seorang Pejabat Anggota.-----

----- Pasal 9 -----

1. Tanpa mengurangi ketentuan tersebut dalam pasal 18----  
ayat 2 Anggaran Dasar ini, Rapat Anggota sah apabila  
dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari 1/2 (satu per  
dua) bagian dari jumlah anggota Perkumpulan.-----
2. Keputusan rapat diambil sedapat-dapatnya dengan-----  
jalan/menurut hikmah kebijaksanaan musyawarah untuk---  
mufakat dengan ketentuan apabila rapat memutuskan usul  
berkaitan dengan pemungutan suara, maka keputusan  
rapat itu sah apabila keputusan itu diambil dengan----

jumlah terbanyak dari suara yang dikeluarkan.

3. Jika dalam rapat itu jumlah anggota yang hadir tidak mencukupi jumlah (quorum) yang ditetapkan dalam pasal ini, maka dapat diadakan rapat untuk kedua kalinya secepat-cepatnya 14 (empatbelas) hari setelah rapat yang pertama dengan ketentuan bahwa rapat yang kedua ini tanpa memandang jumlah anggota yang hadir dapat mengambil keputusan-keputusan tentang apa yang diajukan dalam rapat pertama itu esalkan apabila dalam rapat itu diadakan pemungutan suara maka keputusannya sah jika keputusan itu diambil dengan jumlah terbanyak dari suara yang dikeluarkan.

4. Dalam Rapat Anggota itu masing-masing anggota berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dengan ketentuan bahwa jumlah hak suara dari anggota-anggota keluarga dibatasi dengan 2 (dua) suara.

5. a. Pemungutan suara tentang orang dilakukan dengan rahasia dan tertulis kecuali apabila rapat memutuskan lain.  
Apabila suara-suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka diadakan pemungutan suara sekali lagi, kalau suara dalam pemungutan ulangan masih sama banyaknya maka keputusan diambil dengan jalan undian.

b. Pemungutan suara tentang hal-hal lainnya dilakukan

secara lisan apabila suara-suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul dianggap ditolak.

6. Seorang anggota dapat diwakili oleh anggota lainnya secara tertulis.

#### REFERENDUM

#### Pasal 10

-Disamakan dengan keputusan Rapat Anggota tersebut dalam pasal 7 dan seterusnya di atas keputusan menurut referendum yang dikirimkan kepada seluruh anggota Perkumpulan dan disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian sedangkan untuk perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran Perkumpulan persetujuan itu diperlukan paling sedikit berturut-turut  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dan  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah anggota Perkumpulan.

#### BADAN PENGURUS

#### Pasal 11

1. Perkumpulan diurus dan dipimpin oleh sebuah Badan Pengurus yang dipilih dari anggota-anggota Perkumpulan.

2. Badan Pengurus terdiri dari:

-Ketua : Nyonya NORA QUANI tersebut;

-Sekretaris : Nyonya RELI PAWIDA WATI tersebut;

-Bendahara : Nona NOSA ISRA tersebut;

Anggota-anggota Badan Pengurus diangkat dan

diberhentikan oleh Rapat Anggota yang dimaksudkan  
dalam pasal 7 ayat 2 diatas.

-Penggangkatan tersebut adalah untuk masa jabatan 3 (tiga)  
tahun lamanya demikian dengan ketentuan bahwa apabila  
rapat itu karena sesuatu hal terlambat diadakannya maka  
jangka waktu 3 (tiga) tahun itu dianggap diperpanjang  
hingga pemilihan (anggota-anggota) Badan Pengurus baru  
dalam rapat itu.

4. Para anggota Badan Pengurus lama dapat dipilih  
kembali.

5. Apabila terjadi suatu lowongan dalam keanggotaan Badan  
Pengurus yang menurut Badan Pengurus perlu segera diisi  
dan tidak dapat ditangguhkan sampai diadakannya rapat  
yang dimaksudkan dalam ayat 3 pasal ini, maka Badan  
Pengurus berhak (berwenang) untuk mengisi lowongan itu  
dan disahkan oleh Rapat Anggota yang berikutnya.

#### Pasal 12

1. Badan Pengurus mewakili Perkumpulan ini di dalam dan  
di luar Pengadilan/Hukum dan berhak (berwenang) untuk  
melakukan segala tindakan baik yang mengenai  
kepengurusan maupun yang mengenai hak milik, terkecuali  
untuk meminjam atau meminjamkan uang,  
melepaskan/mengalihkan hak milik atas barang-barang  
tak gerak dan/atau mempertanggungungkan kekayaan  
Perkumpulan, mengikatkan Perkumpulan sebagai penjamin.

udkan

an 3/10

apabila

annya maha

anjang

rus baru

an Badan

ra diisi

s rapat

an

ran itu

m dan

untuk

uali

---

---

in,

Badan Pengurus berkewajiban untuk meminta persetujuan lebih dahulu dari Rapat Anggota.

2. Badan Pengurus terhadap pihak luaran dapat diwakili oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua tanpa atau dengan disertai Sekretaris atau Bendahara atau Pejabat lain.

3. Dalam keadaan yang mendesak guna menyelamatkan Perkumpulan, Badan Pengurus boleh (berwenang untuk) mengambil tindakan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah-Tangga, asalkan untuk tindakan tersebut kemudian dalam waktu selambat-lambatnya (satu) bulan dimintakan pengesahan dari Rapat Anggota.

Pasal 13

1. Anggota-anggota Badan Pengurus berkewajiban untuk menjunjung tinggi dan menjalankan tugas kewajiban mereka menurut Anggaran Dasar, Anggaran Rumah-Tangga, dan Keputusan Rapat Anggota.

2. Anggota-anggota Badan Pengurus bertanggung jawab atas seluruh jalannya organisasi Perkumpulan kepada Rapat Anggota.

Pasal 14

1. Setiap kali jika dianggap perlu oleh Ketua atau setidaknya 3 (tiga) orang anggota Badan Pengurus lainnya akan tetapi sekurang-kurangnya (satu) kali dalam (tiga) bulan, diadakan Rapat Badan Pengurus.

2. Dalam Rapat Badan Pengurus masing-masing anggota Badan  
Pengurus berhak mengeluarkan 1(satu) suara.
3. Rapat Badan Pengurus hanya dapat mengambil keputusan  
apabila dihadiri oleh sedikitnya 2/3 (dua per-  
tiga) bagian dari jumlah anggota Badan pengurus.
4. Keputusan-keputusan Rapat Badan Pengurus sedapat-  
dapatnya diambil dengan jalan/menurut hikmah  
kebijaksanaan musyawarah untuk mufakat dengan  
ketentuan apabila rapat itu memutuskan untuk  
diadakannya pemungutan suara maka keputusannya sah  
apabila keputusan itu diambil dari suara terbanyak  
biasa.

#### KEUANGAN

##### Pasal 15

1. Keuangan Perkumpulan diperoleh dari uang pangkal,  
uang iuran, uang sokongan, hibahan/atau penerimsan  
lainnya yang sah tidak bertentangan dengan peraturan  
hukum dan tidak bertentangan dengan maksud serta  
tujuan Perkumpulan.
2. Jumlah uang pangkal dan uang iuran ditentukan dalam  
Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lain dari Badan  
Pengurus.

#### PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

##### Pasal 16

1. Keputusan tentang perubahan Anggaran Dasar dapat

diambil dengan sah oleh Rapat Anggota yang khusus diadakan yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota dan keputusan itu hanya sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.--

2. Jika dalam rapat itu jumlah anggota yang hadir tidak mencukupi (quorum) yang ditetapkan dalam ayat 1 pasal ini, maka dapat diadakan rapat untuk kedua kalinya secepat-cepatnya 14 (empatbelas) hari setelah rapat yang pertama, dengan ketentuan bahwa rapat yang kedua ini tanpa memandang jumlah anggota yang hadir dapat mengambil keputusan-keputusan tentang apa yang diajukan dalam rapat itu diadakan pemungutan suara-- maka keputusannya sah jika keputusan itu diambil-- dengan jumlah terbanyak dari suara yang dikeluarkan.--

3. Badan Pengurus berwenang untuk menentukan bahwa-- perubahan Anggaran Dasar ini dikeluarkan dengan jalan Referendum sebagaimana tersebut diatas -----

PEMBUBARAN

Pasal 17

1. Perkumpulan hanya dapat dibubarkan atas usul Badan Pengurus, atas usul secara tertulis yang disertai-- alasan-alasannya dari sedikitnya 4 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Perkumpulan kepada Badan Pengurus -----

2. Menyimpang dari ketentuan pasal 9 ayat 1 dan ayat

tersebut diatas keputusan tentang Pembubaran-----  
Perkumpulan hanya dapat diambil dengan sah oleh-----  
Rapat Anggota yang diadakan untuk keperluan itu-----  
dihadiri oleh sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian-----  
dari jumlah anggota Perkumpulan sedangkan-----  
keputusannya diambil secepat-cepatnya dengan-----  
jalan/menurut hikmah kebijaksanaan musyawarah untuk-----  
mufakat dengan ketentuan apabila rapat memutuskan-----  
untuk diadakannya pemungutan suara maka keputusannya-----  
harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 4 (tiga per-----  
empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan-----  
dengan sah.-----

3. Jika dalam rapat itu jumlah anggota yang hadir tidak

mencapai jumlah (quorum) yang ditetapkan dalam ayat-----  
2 pasal ini maka dapat diadakan rapat untuk kedua-----  
kalinya secepat-cepatnya 14 (empatbelas) hari-----  
setelah rapat yang pertama itu dengan banyak anggota-----  
yang hadir dan jumlah suara sama dengan yang-----  
dibutuhkan oleh rapat pertama. dalam rapat mana-----  
dapat diambil keputusan yang sah asal saja di-----  
setujui oleh sekurang-kurangnya 4 (tiga per empat)-----  
jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah.-----

4. Apabila dalam rapat yang dimaksudkan dalam ayat 3

pasal ini yang hadir itu juga tidak mencapai jumlah

2 dan ayat  
beran-----  
ah oleh-----  
luan itu dan  
ige) bagaim  
-----  
gan-----  
erat untuk  
memutuskan  
putusannya  
(tiga per  
keluarkan  
-----  
lic tidak  
lam ayat  
ik kedua  
-----  
anggota  
-----  
sa -----  
empat  
-----  
yat 3  
-----  
lian

(quorum) menurut ketentuan ayat itu, maka pembubaran  
Perkumpulan itu diputuskan dengan jalan Referendum  
sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 10 Anggaran-  
Dasar.-----

- 5. Dalam rapat mengenai pembubaran menurut pasal ini  
diputuskan pula suatu Perkumpulan yang sama tujuannya  
atau suatu badan yang bertujuan sosial kepada siapa  
kekayaan Perkumpulan yang masih ada (sesudah semua  
hutangnya dibayar) diserahkan.-----

----- **Pasal 18** -----  
-Apabila Perkumpulan dibubarkan, maka Badan Pengurus-----  
berkewajiban untuk melakukan likuidasinya, kecuali bila  
rapat Anggota menentukan lain.-----

----- **ANGGARAN RUMAH TANGGA** -----

----- **Pasal 19** -----

- 1. Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan dan diubah oleh  
Rapat Anggota.-----
- 2. Anggaran Rumah Tangga memuat ketentuan-ketentuan yang  
menurut Anggaran Dasar harus diatur dalam Anggaran-----  
Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan mengenai hal-hal  
lain yang dianggap perlu oleh Rapat Anggota.-----
- 3. Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lain-----  
dari Badan Pengurus tidak boleh memuat ketentuan-----  
ketentuan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar-----  
ini.-----

KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

-Hal-hal yang tidak atau kurang cukup diatur dalam  
Anggeran Dasar ini akan diatur lebih lanjut oleh Badan  
Pengurus dengan persetujuan bersama.

-Akhirnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas  
menerangkan mengenai akta ini dengan segala akibatnya  
memilih tempat tinggal yang tetap dan umum pada Kantor  
Sanitera Pengadilan Negeri Muara Enim.

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Penukal Abab  
Lematang Ilir (PALI), pada hari dan tanggal tersebut pada  
bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :

1. Nona RENZA ARISKA, lahir di Pendopo pada tanggal  
duapuluh delapan Agustus seribu sembilanratus  
sembilanpuluh lima (28-08-1995), Warga Negara  
Indonesia, bertempat tinggal di Pendopo Kabupaten  
Penukal Abab Lematang Ilir.

2. Nona SEPTALYA EKA SAPUTRI, lahir di Pendopo pada  
tanggal lima September seribu sembilanratus  
sembilanpuluh empat (05-09-1994), Warga Negara  
Indonesia, bertempat tinggal di Pendopo Kabupaten  
Penukal Abab Lematang Ilir.

- Keduanya Masyarakat Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi  
- Segera setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada

para penghadap dan para saksi, para penghadap-----  
membubuhkan sidik jari jempol kanannya pada lembaran---  
tersendiri dihadapan saya, Notaris dan saksi-saksi,---  
yang dilekatkan pada minuta akta ini, maka seketika itu  
juga akta ini ditandatangani oleh para penghadap,-----  
saksi-saksi dan saya Notaris.-----  
Dibuat dengan tanpa perubahan.-----

-----DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA-----

NOTARIS KABUPATEN MUARA ENIM



ANG DEWANTO, SH., M. Kn